



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.IP-30.OT.01.03 TAHUN 2026

TENTANG

KANTOR IMIGRASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, perlu menyesuaikan pengaturan mengenai nama, nomenklatur, dan wilayah kerja Kantor Imigrasi;
- b. bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.01.03 Tahun 2019 tentang Kantor Imigrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa penyesuaian nama, nomenklatur, dan wilayah kerja Kantor Imigrasi telah melalui pembahasan dan mendapatkan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Kantor Imigrasi di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1310);
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 267);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
- 8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG KANTOR IMIGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.
- KESATU : Menetapkan jumlah, nama, kelas, dan wilayah kerja Kantor Imigrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- KEDUA : Jumlah Kantor Imigrasi di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebanyak 151 (seratus lima puluh satu), dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kelas I Khusus TPI : 7 (tujuh)
 - b. Kelas I Khusus Non TPI : 3 (tiga)
 - c. Kelas I TPI : 38 (tiga puluh delapan)
 - d. Kelas I Non TPI : 14 (empat belas)
 - e. Kelas II TPI : 45 (empat puluh lima)
 - f. Kelas II Non TPI : 21 (dua puluh satu)
 - g. Kelas III TPI : 8 (delapan)
 - h. Kelas III Non TPI : 15 (lima belas)

- KETIGA : Susunan organisasi dan tata kerja Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.01.03 Tahun 2018 tentang Perubahan Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat, Kantor Imigrasi Kelas I Polonia, Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara, Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda, Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar, Kantor Imigrasi Kelas II Belawan, Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan, Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan, Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis, Kantor Imigrasi Kelas II Dumai, dan Kantor Imigrasi Kelas III Tanjung Redeb;
 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.OT.01.03 Tahun 2019 tentang Kantor Imigrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2020 tentang Perubahan Nomenklatur dan Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.OT.01.03 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci Menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok Menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap Menjadi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap dan Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Manokwari Menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari;
 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai Menjadi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya Menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, Kantor Imigrasi Kelas III TPI Labuan Bajo Menjadi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi Menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan Menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang Menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang dan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Baubau Menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau;
 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.03 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur;
 7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III TPI Banyuwangi, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Mandailing Natal, Kantor Imigrasi Kelas III TPI Nias, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bungo, Kantor Imigrasi Kelas III TPI Kotawaringin Barat, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang, dan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Balangan;

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.01.03 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi;
9. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-51.OT.01.03 Tahun 2025 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Morowali, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulon Progo, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Purworejo, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lombok Timur, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Garut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tegal, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bengkulu Utara, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bantaeng, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Lubuklinggau, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bone, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pasuruan, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pohuwato, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Padangsidimpuan, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Klungkung, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tabanan, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tapanuli Utara, dan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Mempawah;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 06 Agustus 2026

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,



AGUS ANDRIANTO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan Keuangan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

LAMPIRAN

Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan

Nomor : M.IP-30.OT.01.03 Tahun 2026

Tanggal : 06 Agustus 2026

DAFTAR KANTOR IMIGRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			
		NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	KELAS	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5	6
I	Aceh	1. Banda Aceh	Kota Banda Aceh	I TPI	1. Kota Banda Aceh 2. Kabupaten Aceh Besar a. Kecamatan Baitussalam b. Kecamatan Blang Bintang c. Kecamatan Darul Imarah d. Kecamatan Darul Kamal e. Kecamatan Darussalam f. Kecamatan Indrapuri g. Kecamatan Ingin Jaya h. Kecamatan Kuta Cot Glie i. Kecamatan Kota Jantho j. Kecamatan Kuta Malaka k. Kecamatan Krueng Barona Jaya l. Kecamatan Kuta Baro m. Kecamatan Lembah Seulawah n. Kecamatan Leupung o. Kecamatan Lhoknga p. Kecamatan Lhoong q. Kecamatan Montasik r. Kecamatan Mesjid Raya s. Kecamatan Peukan Bada t. Kecamatan Seulimeum

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			
		NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	KELAS	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5	6
					u. Kecamatan Simpang Tiga v. Kecamatan Suka Makmur 3. Kabupaten Pidie 4. Kabupaten Pidie Jaya
		5. Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	II TPI	1. Kota Lhokseumawe 2. Kabupaten Aceh Utara 3. Kabupaten Bireun
		6. Langsa	Kota Langsa	II TPI	1. Kota Langsa 2. Kabupaten Aceh Tamiang 3. Kabupaten Aceh Timur
		7. Aceh Barat	Kabupaten Aceh Barat	II TPI	1. Kota Subulussalam 2. Kabupaten Aceh Jaya 3. Kabupaten Aceh Barat 4. Kabupaten Nagan Raya 5. Kabupaten Aceh Barat Daya 6. Kabupaten Aceh Selatan 7. Kabupaten Aceh Singkil 8. Kabupaten Simeuleu
		8. Sabang	Kota Sabang	II TPI	1. Kota Sabang 2. Kabupaten Aceh Besar a. Kecamatan Pulo Aceh b. Pulau Breuh c. Pulau Nasi d. Pulau Teunom e. pulau-pulau kecil di sekitarnya
		9. Aceh Tengah	Kabupaten Aceh Tengah	III Non TPI	1. Kabupaten Aceh Tengah 2. Kabupaten Bener Meriah 3. Kabupaten Aceh Tenggara 4. Kabupaten Gayo Lues
II	Sumatera Utara	1. Kualanamu	Kota Medan		1. Kota Binjai

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			
		NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	KELAS	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5	6
				I Khusus TPI	2. Kabupaten Deli Serdang 3. Kabupaten Langkat 4. Kabupaten Karo 5. Kabupaten Serdang Bedagai
		2. Medan	Kota Medan	I Non TPI	Kota Medan a. Kecamatan Medan Kota b. Kecamatan Medan Polonia c. Kecamatan Medan Maimun d. Kecamatan Medan Baru e. Kecamatan Medan Amplas f. Kecamatan Medan Selayang g. Kecamatan Medan Tuntungan h. Kecamatan Medan Johor i. Kecamatan Medan Petisah j. Kecamatan Medan Area k. Kecamatan Medan Sunggal l. Kecamatan Medan Helvetia m. Kecamatan Medan Denai n. Kecamatan Medan Tembung o. Kecamatan Medan Timur p. Kecamatan Medan Perjuangan q. Kecamatan Medan Barat
		3. Belawan	Kota Medan	II TPI	Kota Medan a. Pelabuhan Laut Belawan b. Kecamatan Medan Belawan c. Kecamatan Medan Labuhan d. Kecamatan Medan Marelan e. Kecamatan Medan Deli
		4. Simalungun			1. Kabupaten Simalungun

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			
		NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	KELAS	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5	6
			Kabupaten Simalungun	II Non TPI	2. Kota Tebing Tinggi 3. Kabupaten Samosir 4. Kota Pematang Siantar 5. Kabupaten Dairi 6. Kabupaten Pakpak Bharat
		5. Asahan	Kabupaten Asahan	II TPI	1. Kota Tanjung Balai 2. Kabupaten Asahan 3. Kabupaten Batubara 4. Kabupaten Labuhanbatu 5. Kabupaten Labuhanbatu Selatan 6. Kabupaten Labuhanbatu Utara
		6. Sibolga	Kota Sibolga	II TPI	1. Kota Sibolga 2. Kabupaten Tapanuli Tengah 3. Kabupaten Padang Lawas Utara
		7. Mandailing Natal	Kabupaten Mandailing Natal	III Non TPI	1. Kabupaten Mandailing Natal 2. Kabupaten Padang Lawas
		8. Nias	Kota Gunung Sitoli	III TPI	1. Kota Gunung Sitoli 2. Kabupaten Nias 3. Kabupaten Nias Utara 4. Kabupaten Nias Barat 5. Kabupaten Nias Selatan
		9. Padangsidimpuan	Kota Padangsidimpuan	III Non TPI	1. Kota Padangsidimpuan 2. Kabupaten Tapanuli Selatan
		10. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara	III TPI	1. Kabupaten Tapanuli Utara 2. Kabupaten Humbang Hasundutan 3. Kabupaten Toba Samosir
III	Sumatera Barat	1. Padang	Kota Padang	I TPI	1. Kota Padang 2. Kota Sawahlunto

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			
		NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	KELAS	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5	6
					3. Kota Solok 4. Kota Pariaman 5. Kabupaten Padang Pariaman 6. Kabupaten Pesisir Selatan 7. Kabupaten Sijunjung 8. Kabupaten Solok 9. Kabupaten Solok Selatan 10. Kabupaten Dharmasraya 11. Kabupaten Kepulauan Mentawai
		2. Agam	Kabupaten Agam	I Non TPI	1. Kota Bukittinggi 2. Kota Payakumbuh 3. Kota Padang Panjang 4. Kabupaten Agam 5. Kabupaten Pasaman Barat 6. Kabupaten Pasaman 7. Kabupaten Lima Puluh Kota 8. Kabupaten Tanah Datar
IV	Riau	1. Pekanbaru	Kota Pekanbaru	I TPI	1. Kota Pekanbaru 2. Kabupaten Kampar 3. Kabupaten Rokan Hulu 4. Kabupaten Palalawan
		2. Dumai	Kota Dumai	I TPI	Kota Dumai
		3. Indragiri Hilir	Kabupaten Indragiri Hilir	II TPI	1. Kabupaten Indragiri Hilir 2. Kabupaten Indragiri Hulu 3. Kabupaten Kuantan Singingi
		4. Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	II TPI	Kabupaten Bengkalis
		5. Rokan Hilir	Kabupaten Rokan Hilir	II TPI	Kabupaten Rokan Hilir

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			
		NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	KELAS	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5	6
		6. Kepulauan Meranti	Kabupaten Kepulauan Meranti	II TPI	Kabupaten Kepulauan Meranti
		7. Siak	Kabupaten Siak	II TPI	Kabupaten Siak
V	Jambi	1. Jambi	Kota Jambi	I TPI	1. Kota Jambi 2. Kabupaten Muaro Jambi 3. Kabupaten Batang Hari 4. Kabupaten Sarolangun
		2. Tanjung Jabung Barat	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	II TPI	1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
		3. Kerinci	Kabupaten Kerinci	II Non TPI	1. Kabupaten Kerinci 2. Kabupaten Sungai Penuh 3. Kabupaten Merangin
		4. Bungo	Kabupaten Bungo	III Non TPI	1. Kabupaten Bungo 2. Kabupaten Tebo
VI	Kepulauan Riau	1. Batam	Kota Batam	I Khusus TPI	Kota Batam a. Kecamatan Batam Kota b. Kecamatan Batu Aji c. Kecamatan Batu Ampar d. Kecamatan Bengkong e. Kecamatan Bulang f. Kecamatan Galang g. Kecamatan Lubuk Baja h. Kecamatan Nongsa i. Kecamatan Sagulung j. Kecamatan Sei Beduk k. Kecamatan Sekupang
		2. Tanjung Pinang	Kota Tanjung Pinang	I TPI	1. Kota Tanjung Pinang 2. Kabupaten Bintan a. Kecamatan Toapaya

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			
		NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	KELAS	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5	6
					b. Kecamatan Gunung Kijang c. Kecamatan Bintan Timur
		3. Belakang Padang	Kota Batam	II TPI	Kota Batam a. Kecamatan Belakang Padang
		4. Lingga	Kabupaten Lingga	II Non TPI	Kabupaten Lingga
		5. Natuna	Kabupaten Natuna	II TPI	Kabupaten Natuna
		6. Karimun	Kabupaten Karimun	II TPI	Kabupaten Karimun
		7. Bintan	Kabupaten Bintan	II TPI	Kabupaten Bintan a. Kecamatan Teluk Bintan b. Kecamatan Sri Kuala Lobam c. Kecamatan Teluk Sebong d. Kecamatan Mantang e. Kecamatan Bintan Pesisir f. Kecamatan Tambelan g. Kecamatan Bintan Utara
		8. Kepulauan Anambas	Kabupaten Kepulauan Anambas	II TPI	Kabupaten Kepulauan Anambas
VII	Kepulauan Bangka Belitung	1. Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	I TPI	1. Kota Pangkal Pinang 2. Kabupaten Bangka 3. Kabupaten Bangka Selatan 4. Kabupaten Bangka Tengah 5. Kabupaten Bangka Barat
		2. Belitung	Kabupaten Belitung	II TPI	1. Kabupaten Belitung 2. Kabupaten Belitung Timur
VIII	Bengkulu	1. Bengkulu	Kota Bengkulu	I TPI	1. Kota Bengkulu 2. Kabupaten Rejang Lebong 3. Kabupaten Seluma

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			
		NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	KELAS	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5	6
					4. Kabupaten Kepahiang 5. Kabupaten Kaur 6. Kabupaten Bengkulu Tengah 7. Kabupaten Bengkulu Selatan
		2. Bengkulu Utara	Kabupaten Bengkulu Utara	III Non TPI	1. Kabupaten Bengkulu Utara 2. Kabupaten Mukomuko 3. Kabupaten Lebong
IX	Sumatera Selatan	1. Palembang	Kota Palembang	I TPI	1. Kota Palembang 2. Kota Prabumulih 3. Kabupaten Banyuasin 4. Kabupaten Musi Banyu Asin 5. Kabupaten Ogan Ilir 6. Kabupaten Ogan Komering Ilir
		2. Muara Enim	Kabupaten Muara Enim	II Non TPI	1. Kabupaten Muara Enim 2. Kota Pagar Alam 3. Kabupaten Empat Lawang 4. Kabupaten Lahat 5. Kabupaten Ogan Komering Ulu 6. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 7. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 8. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
		3. Lubuklinggau	Kota Lubuklinggau	III Non TPI	1. Kota Lubuklinggau 2. Kabupaten Musi Rawas 3. Kabupaten Musi Rawas Utara
X	Lampung	1. Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung	I TPI	1. Kota Bandar Lampung 2. Kota Metro 3. Kabupaten Pesawaran 4. Kabupaten Pringsewu 5. Kabupaten Tanggamus

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			
		NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	KELAS	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5	6
					6. Kabupaten Lampung Tengah 7. Pelabuhan Laut Panjang
		2. Lampung Selatan	Kabupaten Lampung Selatan	II TPI	1. Kabupaten Lampung Selatan 2. Kabupaten Lampung Timur
		3. Lampung Utara	Kabupaten Lampung Utara	II Non TPI	1. Kabupaten Lampung Utara 2. Kabupaten Lampung Barat 3. Kabupaten Way Kanan 4. Kabupaten Mesuji 5. Kabupaten Tulang Bawang 6. Kabupaten Tulang Bawang Barat 7. Kabupaten Pesisir Barat
XI	Banten	1. Tangerang	Kota Tangerang	I Khusus Non TPI	1. Kota Tangerang a. Kecamatan Tangerang b. Kecamatan Jatiuwung c. Kecamatan Batuceper d. Kecamatan Cipondoh e. Kecamatan Ciledug f. Kecamatan Karawaci g. Kecamatan Periuk h. Kecamatan Cibodas i. Kecamatan Pinang j. Kecamatan Karang Tengah k. Kecamatan Larangan 2. Kabupaten Tangerang a. Kecamatan Mekarbaru b. Kecamatan Gunung Kaler c. Kecamatan Kronjo d. Kecamatan Kemiri e. Kecamatan Mauk f. Kecamatan Sukadiri

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			
		NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	KELAS	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5	6
					g. Kecamatan Sepatan h. Kecamatan Sepatan Timur i. Kecamatan Rajeg j. Kecamatan Kresek k. Kecamatan Sukamulya l. Kecamatan Sindang Jaya m. Kecamatan Pasar Kemis n. Kecamatan Jayanti o. Kecamatan Balaraja p. Kecamatan Cikupa q. Kecamatan Tigaraksa r. Kecamatan Cisoka s. Kecamatan Solear t. Kecamatan Jambe u. Kecamatan Panongan v. Kecamatan Curug w. Kecamatan Kelapa Dua x. Kecamatan Legok y. Kecamatan Pagedangan z. Kecamatan Cisauk 3. Kota Tangerang Selatan
		2. Serang	Kota Serang	I TPI	1. Kota Serang 2. Kabupaten Lebak 3. Kabupaten Pandeglang 4. Kabupaten Serang
		3. Cilegon	Kota Cilegon	II TPI	Kota Cilegon
XII	Jawa Barat	1. Bandung	Kota Bandung	I TPI	1. Kota Bandung 2. Kota Cimahi 3. Kabupaten Bandung

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			
		NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	KELAS	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5	6
					4. Kabupaten Bandung Barat 5. Kabupaten Subang
		2. Bogor	Kota Bogor	I Non TPI	1. Kota Bogor 2. Kabupaten Bogor
		3. Cirebon	Kota Cirebon	I TPI	1. Kota Cirebon 2. Kabupaten Cirebon 3. Kabupaten Indramayu 4. Kabupaten Kuningan 5. Kabupaten Majalengka
		4. Sukabumi	Kota Sukabumi	I Non TPI	1. Kota Sukabumi 2. Kabupaten Sukabumi
		5. Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	I Non TPI	1. Kota Tasikmalaya 2. Kota Banjar 3. Kabupaten Tasikmalaya 4. Kabupaten Pangandaran 5. Kabupaten Ciamis
		6. Karawang	Kabupaten Karawang	I Non TPI	1. Kabupaten Purwakarta 2. Kabupaten Karawang
		7. Depok	Kota Depok	I Non TPI	Kota Depok
		8. Bekasi	Kota Bekasi	I Non TPI	1. Kota Bekasi 2. Kabupaten Bekasi
		9. Garut	Kabupaten Garut	II Non TPI	1. Kabupaten Garut 2. Kabupaten Sumedang
		10. Cianjur	Kabupaten Cianjur	III Non TPI	Kabupaten Cianjur
XIII	DKI Jakarta	1. Soekarno-Hatta	Kota Tangerang	I Khusus TPI	1. Bandar Udara Soekarno-Hatta 2. Kota Administrasi Jakarta Barat a. Kecamatan Cengkareng b. Kecamatan Kalideres

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			
		NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	KELAS	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5	6
					3. Kabupaten Tangerang a. Kecamatan Teluknaga b. Kecamatan Pakuhaji c. Kecamatan Kosambi 4. Kota Tangerang a. Kecamatan Benda b. Wilayah Pergudangan Soekarno-Hatta
		2. Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat	I Khusus Non TPI	Kota Administrasi Jakarta Barat a. Kecamatan Grogol Petamburan b. Kecamatan Kebon Jeruk c. Kecamatan Kembangan d. Kecamatan Palmerah e. Kecamatan Taman Sari f. Kecamatan Tambora
		3. Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Selatan	I Khusus Non TPI	Kota Administrasi Jakarta Selatan
		4. Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Pusat	I Non TPI	Kota Administrasi Jakarta Pusat
		5. Jakarta Timur	Kota Administrasi Jakarta Timur	I TPI	Kota Administrasi Jakarta Timur
		6. Tanjung Priok	Kota Administrasi Jakarta Utara	I TPI	1. Pelabuhan Laut Tanjung Priok 2. Kota Administrasi Jakarta Utara a. Kecamatan Tanjung Priok b. Kecamatan Koja 3. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
		7. Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Utara	I TPI	Kota Administrasi Jakarta Utara a. Kecamatan Pademangan b. Kecamatan Kelapa Gading c. Kecamatan Cilincing d. Kecamatan Penjaringan

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			
		NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	KELAS	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5	6
XIV	Jawa Tengah	1. Semarang	Kota Semarang	I Khusus TPI	1. Kota Semarang 2. Kota Salatiga 3. Kabupaten Semarang 4. Kabupaten Demak 5. Kabupaten Kendal
		2. Surakarta	Kota Surakarta	I TPI	1. Kota Surakarta 2. Kabupaten Sragen 3. Kabupaten Karanganyar 4. Kabupaten Klaten 5. Kabupaten Sukoharjo 6. Kabupaten Wonogiri 7. Kabupaten Boyolali
		3. Cilacap	Kabupaten Cilacap	I TPI	1. Kabupaten Cilacap 2. Kabupaten Banyumas 3. Kabupaten Banjarnegara 4. Kabupaten Purbalingga
		4. Pemalang	Kabupaten Pemalang	I Non TPI	1. Kabupaten Pemalang 2. Kota Pekalongan 3. Kabupaten Batang 4. Kabupaten Pekalongan
		5. Pati	Kabupaten Pati	I Non TPI	1. Kabupaten Pati 2. Kabupaten Jepara 3. Kabupaten Kudus
		6. Blora	Kabupaten Blora	I Non TPI	1. Kabupaten Blora 2. Kabupaten Rembang 3. Kabupaten Grobogan
		7. Wonosobo	Kabupaten Wonosobo	II Non TPI	1. Kabupaten Wonosobo 2. Kota Magelang 3. Kabupaten Magelang 4. Kabupaten Temanggung

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			
		NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	KELAS	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5	6
		8. Purworejo	Kabupaten Purworejo	II Non TPI	1. Kabupaten Purworejo 2. Kabupaten Kebumen
		9. Tegal	Kabupaten Tegal	II Non TPI	1. Kabupaten Tegal 2. Kota Tegal 3. Kabupaten Brebes
XV	Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Yogyakarta	Kota Yogyakarta	I Non TPI	1. Kota Yogyakarta 2. Kabupaten Gunungkidul 3. Kabupaten Sleman
		2. Kulon Progo	Kabupaten Kulon Progo	II TPI	1. Kabupaten Kulon Progo 2. Kabupaten Bantul
XVI	Jawa Timur	1. Juanda	Kabupaten Sidoarjo	I Khusus TPI	1. Kota Surabaya a. Kecamatan Bubutan b. Kecamatan Dukuh Pakis c. Kecamatan Gayungan d. Kecamatan Genteng e. Kecamatan Gubeng f. Kecamatan Gunung Anyar g. Kecamatan Jember h. Kecamatan Karangpilang i. Kecamatan Mulyorejo j. Kecamatan Rungkut k. Kecamatan Sawahan l. Kecamatan Simokerto m. Kecamatan Sukolilo n. Kecamatan Tambaksari o. Kecamatan Tegalsari p. Kecamatan Tenggilis Mejoyo q. Kecamatan Wiyung r. Kecamatan Wonocolo s. Kecamatan Wonokromo

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			
		NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	KELAS	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5	6
					2. Kota Mojokerto 3. Kabupaten Mojokerto 4. Kabupaten Sidoarjo
		2. Tanjung Perak	Kota Surabaya	I TPI	1. Kota Surabaya a. Kecamatan Asemrowo b. Kecamatan Benowo c. Kecamatan Bulak d. Kecamatan Kenjeran e. Kecamatan Krembangan f. Kecamatan Lakarsantri g. Kecamatan Pabean Cantikan h. Kecamatan Pakal i. Kecamatan Sambikerep j. Kecamatan Semampir k. Kecamatan Sukomanunggal l. Kecamatan Tandes 2. Kabupaten Gresik 3. Kabupaten Bojonegoro 4. Kabupaten Lamongan 5. Kabupaten Tuban 6. Pelabuhan Laut Tanjung Perak
		7. Malang	Kota Malang	I TPI	1. Kota Malang 2. Kota Batu 3. Kota Probolinggo 4. Kabupaten Malang 5. Kabupaten Probolinggo
		8. Jember	Kabupaten Jember	I TPI	1. Kabupaten Jember 2. Kabupaten Bondowoso 3. Kabupaten Lumajang
		9. Blitar	Kota Blitar		1. Kota Blitar

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			
		NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	KELAS	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5	6
				II Non TPI	2. Kabupaten Blitar 3. Kabupaten Tulungagung
		10. Madiun	Kabupaten Madiun	II Non TPI	1. Kota Madiun 2. Kabupaten Madiun 3. Kabupaten Magetan 4. Kabupaten Ngawi
		11. Pamekasan	Kabupaten Pamekasan	II Non TPI	1. Kabupaten Sumenep 2. Kabupaten Pamekasan 3. Kabupaten Bangkalan 4. Kabupaten Sampang
		12. Kediri	Kabupaten Kediri	II TPI	1. Kota Kediri 2. Kabupaten Kediri 3. Kabupaten Nganjuk 4. Kabupaten Jombang
		13. Ponorogo	Kabupaten Ponorogo	II Non TPI	1. Kabupaten Ponorogo 2. Kabupaten Pacitan 3. Kabupaten Trenggalek
		14. Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	III TPI	1. Kabupaten Banyuwangi 2. Kabupaten Situbondo
		15. Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	III Non TPI	1. Kabupaten Pasuruan 2. Kota Pasuruan
XVII	Kalimantan Barat	1. Pontianak	Kabupaten Pontianak	I TPI	1. Kota Pontianak 2. Kabupaten Kubu Raya
		2. Singkawang	Kota Singkawang	I TPI	1. Kota Singkawang 2. Kabupaten Bengkayang
		3. Sanggau	Kabupaten Sanggau	II TPI	1. Kabupaten Sanggau a. Kecamatan Toba b. Kecamatan Meluai c. Kecamatan Kapuas d. Kecamatan Mukok

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			
		NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	KELAS	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5	6
					e. Kecamatan Jangkak f. Kecamatan Bonti g. Kecamatan Parindu h. Kecamatan Tayan Hilir i. Kecamatan Balai j. Kecamatan Tayan Hulu 2. Kabupaten Sekadau 3. Kabupaten Sintang 4. Kabupaten Melawi
		5. Sambas	Kabupaten Sambas	II TPI	Kabupaten Sambas
		6. Entikong	Kabupaten Sanggau	II TPI	Kabupaten Sanggau a. Kecamatan Entikong b. Kecamatan Sekayam c. Kecamatan Beduai d. Kecamatan Kembayan e. Kecamatan Noyan
		7. Ketapang	Kabupaten Ketapang	II Non TPI	1. Kabupaten Ketapang 2. Kabupaten Kayong Utara
		8. Kapuas Hulu	Kabupaten Kapuas Hulu	III TPI	Kabupaten Kapuas Hulu
		9. Mempawah	Kabupaten Mempawah	III TPI	1. Kabupaten Mempawah 2. Kabupaten Landak
XVIII	Kalimantan Tengah	1. Palangka Raya	Kota Palangka Raya	I Non TPI	1. Kota Palangka Raya 2. Kabupaten Barito Selatan 3. Kabupaten Pulau Pisau 4. Kabupaten Barito Utara 5. Kabupaten Murung Raya 6. Kabupaten Barito Timur

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			
		NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	KELAS	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5	6
					7. Kabupaten Gunung Mas 8. Kabupaten Kapuas
		2. Kotawaringin Timur	Kabupaten Kotawaringin Timur	II TPI	1. Kabupaten Kotawaringin Timur 2. Kabupaten Seruyan 3. Kabupaten Katingan
		3. Kotawaringin Barat	Kabupaten Kotawaringin Barat	III TPI	1. Kabupaten Kotawaringin Barat 2. Kabupaten Lamandau 3. Kabupaten Sukamara
XIX	Kalimantan Selatan	1. Banjarbaru	Kota Banjarbaru	I TPI	1. Kota Banjarmasin 2. Kota Banjarbaru 3. Kabupaten Banjar 4. Kabupaten Barito Kuala 5. Kabupaten Tanah Laut 6. Kabupaten Tapin
		2. Tanah Bumbu	Kabupaten Tanah Bumbu	II TPI	1. Kabupaten Tanah Bumbu 2. Kabupaten Kotabaru
		3. Balangan	Kabupaten Balangan	III Non TPI	1. Kabupaten Balangan 2. Kabupaten Tabalong 3. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 4. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 5. Kabupaten Hulu Sungai Utara
XX	Kalimantan Timur	1. Balikpapan	Kota Balikpapan	I TPI	1. Kota Balikpapan 2. Kabupaten Penajam Paser Utara 3. Kabupaten Paser
		2. Samarinda	Kota Samarinda	I TPI	1. Kota Samarinda 2. Kabupaten Kutai Kartanegara 3. Kabupaten Mahakam Ulu 4. Kabupaten Kutai Barat
		3. Tarakan	Kota Tarakan	II TPI	1. Kota Tarakan 2. Kabupaten Malinau

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			
		NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	KELAS	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5	6
					3. Kabupaten Tana Tidung 4. Kabupaten Bulungan
		4. Nunukan	Kabupaten Nunukan	II TPI	Kabupaten Nunukan
		5. Berau	Kabupaten Berau	III TPI	Kabupaten Berau
		6. Bontang	Kota Bontang	III TPI	1. Kota Bontang 2. Kabupaten Kutai Timur
XXI	Bali	1. Ngurah Rai	Kabupaten Badung	I Khusus TPI	1. Bandar Udara Ngurah Rai 2. Kabupaten Badung
		2. Denpasar	Kota Denpasar	I TPI	1. Kota Denpasar 2. Kabupaten Bangli 3. Kabupaten Gianyar
		3. Buleleng	Kabupaten Buleleng	II TPI	1. Kabupaten Buleleng 2. Kabupaten Karangasam 3. Kabupaten Jembarana
		4. Klungkung	Kabupaten Klungkung	III Non TPI	Kabupaten Klungkung
		5. Tabanan	Kabupaten Tabanan	III Non TPI	Kabupaten Tabanan
XXII	Nusa Tenggara Barat	1. Mataram	Kota Mataram	I TPI	1. Kota Mataram 2. Kabupaten Lombok Tengah 3. Kabupaten Lombok Barat
		2. Sumbawa	Kabupaten Sumbawa	II TPI	1. Kabupaten Sumbawa 2. Kabupaten Sumbawa Barat
		3. Bima	Kabupaten Bima	II Non TPI	1. Kota Bima 2. Kabupaten Bima 3. Kabupaten Dompu
		4. Lombok Timur	Kabupaten Lombok Timur	II Non TPI	1. Kabupaten Lombok Timur 2. Kabupaten Lombok Utara

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			
		NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	KELAS	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5	6
XXIII	Nusa Tenggara Timur	1. Kupang	Kota Kupang	I TPI	1. Kota Kupang 2. Kabupaten Alor 3. Kabupaten Kupang 4. Kabupaten Rote Ndao 5. Kabupaten Timor Tengah Selatan 6. Kabupaten Sumba Barat 7. Kabupaten Sumba Timur 8. Kabupaten Sumba Barat Daya 9. Kabupaten Sumba Tengah 10. Kabupaten Sabu Raijua
		2. Sikka	Kabupaten Sikka	II TPI	1. Kabupaten Sikka 2. Kabupaten Lembata 3. Kabupaten Flores Timur 4. Kabupaten Ende 5. Kabupaten Nagekeo
		3. Belu	Kabupaten Belu	II TPI	1. Kabupaten Belu 2. Kabupaten Malaka 3. Kabupaten Timor Tengah Utara
		4. Manggarai Barat	Kabupaten Manggarai Barat	II TPI	1. Kabupaten Manggarai Barat 2. Kabupaten Manggarai 3. Kabupaten Manggarai Timur 4. Kabupaten Ngada
XXIV	Sulawesi Utara	1. Manado	Kota Manado	I TPI	1. Kota Manado 2. Kota Tomohon 3. Kabupaten Minahasa 4. Kabupaten Minahasa Selatan 5. Kabupaten Minahasa Tenggara
		2. Kepulauan Sangihe	Kabupaten Kepulauan Sangihe	II TPI	1. Kabupaten Kepulauan Sangihe 2. Kabupaten Talaud 3. Kabupaten Kepulauan Sitaro

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			
		NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	KELAS	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5	6
		3. Bitung	Kota Bitung	II TPI	1. Kota Bitung 2. Kabupaten Minahasa Utara
		4. Kotamobagu	Kota Kotamobagu	II Non TPI	1. Kota Kotamobagu 2. Kabupaten Bolaang Mongondow 3. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 4. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 5. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
XXV	Gorontalo	1. Gorontalo	Kota Gorontalo	I TPI	1. Kota Gorontalo 2. Kabupaten Gorontalo 3. Kabupaten Bone Bolango 4. Kabupaten Gorontalo Utara
		2. Pohuwato	Kabupaten Pohuwato	III Non TPI	1. Kabupaten Pohuwato 2. Kabupaten Boalemo
XXVI	Sulawesi Tengah	1. Palu	Kota Palu	I TPI	1. Kota Palu 2. Kabupaten Sigi 3. Kabupaten Poso 4. Kabupaten Parigi Moutong 5. Kabupaten Toli-Toli 6. Kabupaten Buol 7. Kabupaten Donggala
		2. Morowali	Kabupaten Morowali	I TPI	1. Kabupaten Morowali 2. Kabupaten Morowali Utara
		3. Banggai	Kabupaten Banggai	II TPI	1. Kabupaten Banggai 2. Kabupaten Banggai Kepulauan 3. Kabupaten Tojo Una-Una 4. Kabupaten Banggai Laut
XXVII	Sulawesi Barat	1. Mamuju	Kabupaten Mamuju	II Non TPI	1. Kabupaten Mamuju 2. Kabupaten Mamuju Tengah 3. Kabupaten Mamuju Utara

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			
		NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	KELAS	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5	6
		2. Polewali Mandar	Kabupaten Polewali Mandar	II Non TPI	1. Kabupaten Polewali Mandar 2. Kabupaten Majene 3. Kabupaten Mamasa
XXVIII	Sulawesi Selatan	1. Makassar	Kota Makassar	I Khusus TPI	1. Kota Makassar 2. Kabupaten Maros 3. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 4. Kabupaten Gowa 5. Kabupaten Takalar 6. Kabupaten Jeneponto
		2. Parepare	Kota Parepare	II TPI	1. Kota Parepare 2. Kabupaten Barru 3. Kabupaten Enrekang 4. Kabupaten Pinrang 5. Kabupaten Sidenreng Rappang 6. Kabupaten Wajo 7. Kabupaten Tana Toraja
		3. Palopo	Kota Palopo	II Non TPI	1. Kota Palopo 2. Kabupaten Luwu 3. Kabupaten Luwu Utara 4. Kabupaten Luwu Timur 5. Kabupaten Toraja Utara
		4. Bantaeng	Kabupaten Bantaeng	III Non TPI	1. Kabupaten Bantaeng 2. Kabupaten Bulukumba 3. Kabupaten Kepulauan Selayar
		5. Bone	Kabupaten Bone	III Non TPI	1. Kabupaten Bone 2. Kabupaten Sinjai 3. Kabupaten Soppeng
XXIX	Sulawesi Tenggara	1. Kendari	Kota Kendari	I TPI	1. Kota Kendari 2. Kabupaten Konawe 3. Kabupaten Konawe Selatan

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			
		NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	KELAS	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5	6
					4. Kabupaten Konawe Utara 5. Kabupaten Kolaka 6. Kabupaten Kolaka Timur 7. Kabupaten Konawe Kepulauan 8. Kabupaten Kolaka Utara
		2. Bau-Bau	Kota Bau-Bau	II Non TPI	1. Kota Bau-Bau 2. Kabupaten Buton 3. Kabupaten Muna 4. Kabupaten Bombana 5. Kabupaten Buton Utara
		3. Wakatobi	Kabupaten Wakatobi	III Non TPI	Kabupaten Wakatobi
XXX	Maluku	1. Ambon	Kota Ambon	I TPI	1. Kota Ambon 2. Kabupaten Maluku Tengah 3. Kabupaten Seram Bagian Barat 4. Kabupaten Seram Bagian Timur 5. Kabupaten Buru 6. Kabupaten Buru Selatan
		2. Tual	Kota Tual	II TPI	1. Kota Tual 2. Kabupaten Maluku Tenggara 3. Kabupaten Kepulauan Tanimbar 4. Kabupaten Kepulauan Aru 5. Kabupaten Maluku Barat Daya
XXXI	Maluku Utara	1. Ternate	Kota Ternate	I TPI	1. Kota Ternate 2. Kota Tidore Kepulauan 3. Kabupaten Halmahera Selatan 4. Kabupaten Halmahera Barat 5. Kabupaten Kepulauan Sula 6. Kabupaten Pulau Taliabu

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			
		NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	KELAS	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5	6
		2. Halmahera Utara	Kabupaten Halmahera Utara	II TPI	1. Kabupaten Halmahera Utara 2. Kabupaten Halmahera Timur 3. Kabupaten Halmahera Tengah 4. Kabupaten Pulau Morotai
XXXII	Papua Barat	1. Manokwari	Kabupaten Manokwari	I TPI	1. Kabupaten Manokwari 2. Kabupaten Pegunungan Arfak 3. Kabupaten Manokwari Selatan 4. Kabupaten Teluk Bintuni 5. Kabupaten Teluk Wondama 6. Kabupaten Fakfak 7. Kabupaten Kaimana
		2. Sorong	Kota Sorong	II TPI	1. Kota Sorong 2. Kabupaten Sorong 3. Kabupaten Raja Ampat 4. Kabupaten Tambrauw 5. Kabupaten Maybrat 6. Kabupaten Sorong Selatan
XXXIII	Papua	1. Jayapura	Kota Jayapura	I TPI	1. Kota Jayapura 2. Kabupaten Jayapura 3. Kabupaten Jayawijaya 4. Kabupaten Keerom 5. Kabupaten Sarmi 6. Kabupaten Pegunungan Bintang 7. Kabupaten Yahukimo 8. Kabupaten Tolikara 9. Kabupaten Mamberamo Tengah 10. Kabupaten Yalimo 11. Kabupaten Lanny Jaya 12. Kabupaten Nduga
		2. Biak Numfor			1. Kabupaten Biak Numfor

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			
		NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	KELAS	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5	6
			Kabupaten Biak Numfor	II TPI	2. Kabupaten Supiori 3. Kabupaten Waropen 4. Kabupaten Kepulauan Yapen 5. Kabupaten Memberano Raya
		3. Merauke	Kabupaten Merauke	II TPI	1. Kabupaten Merauke 2. Kabupaten Boven Digoel 3. Kabupaten Asmat 4. Kabupaten Mappi
		4. Mimika	Kabupaten Mimika	II TPI	1. Kabupaten Mimika 2. Kabupaten Puncak Jaya 3. Kabupaten Dogiyai 4. Kabupaten Deiyai 5. Kabupaten Paniai 6. Kabupaten Intan Jaya 7. Kabupaten Puncak 8. Kabupaten Nabire



MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

AGUS ANDRIANTO